



Volume 10, Nomor 1, Juni 2025, 21-48  
ISSN 2407-4292 (Print), ISSN 2721-6780 (Online)  
Doi: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v10i1.5359>  
Available Online: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp>

## STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA BERBASIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR

Hurairah Haqi Ikhlas<sup>\*1</sup>, Sabrina Chaerani Astuti<sup>2</sup>, Gildha Eka Putri<sup>3</sup>, Belinda Ulfa Aulia<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya, Jalan Raya ITS Kampus ITS Sukolilo Surabaya Jawa Timur 60111, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117; email: [haqi160402@gmail.com](mailto:haqi160402@gmail.com)

\*Correspondence

Received: 26-06-2025; Accepted: 04-11-2025; Published: 11-11-2025

**Abstract:** *The Gerbangkertosusila metropolitan area in East Java demonstrates rapid economic expansion, yet significant interregional inequality persists. Surabaya remains the economic core, contributing 25.77% to East Java's GRDP, while peripheral regions such as Bangkalan, Lamongan, and Mojokerto City lag behind in both economic output and social welfare. Using descriptive statistics, the Williamson Index, and SWOT analysis, this study finds that the average Williamson Index from 2020 to 2024 is 0.8442, with the lowest value of 0.8258 (2020) and the highest of 0.8631 (2024), indicating widening disparities. These results highlight that economic growth has not been evenly distributed across the metropolitan region. This research contributes to the theoretical discourse on inclusive regional development by emphasizing economic diversification, interregional connectivity, and locally based investment. Policy-wise, it advocates a polycentric development approach, stronger cross-district coordination, and optimized metropolitan governance to reduce dependence on Surabaya and promote inclusive, balanced, and sustainable regional growth.*

**Keywords:** *Gerbangkertosusila, equitable development, economic growth, Williamson Index, regional development strategy.*

**Abstrak:** Kawasan metropolitan Gerbangkertosusila di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun ketimpangan antarwilayah masih tinggi. Kota Surabaya menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur (25,77%), sedangkan Bangkalan, Lamongan, dan Kota Mojokerto tertinggal secara ekonomi dan sosial. Analisis menggunakan metode statistik deskriptif, Indeks Williamson, dan SWOT menunjukkan nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,8442 selama periode 2020–2024, dengan angka terendah 0,8258 (2020) dan tertinggi 0,8631 (2024), mengindikasikan disparitas yang semakin meningkat. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan belum terdistribusi secara merata di antara wilayah pusat dan pinggiran. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual pada pendekatan inclusive regional development dengan menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi, penguatan konektivitas antarwilayah, serta investasi berbasis potensi lokal. Secara kebijakan, hasil studi ini merekomendasikan penerapan strategi multi-pusat (polycentric development), integrasi program lintas kabupaten/kota, dan optimalisasi forum koordinasi kawasan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Surabaya serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Gerbangkertosusila.

**Kata Kunci:** Gerbangkertosusila, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, strategi pengembangan kawasan.

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan salah satu unsur dalam mengatasi permasalahan perekonomian (Kamilah & Yulianah, 2018; Mahardika, 2019). Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi (Desmawan et al., 2024; Spasial et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, salah satu upaya percepatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal adalah dengan penetapan kawasan strategis (Studi et al., 2022). Kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku (Ayu Pramitha Purwanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis et al., 2021).

Pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi baik secara vertikal antar kelas sosial maupun horizontal antar wilayah. Ketimpangan dalam pendapatan, pendidikan, dan akses layanan publik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial (Trump, 2020). Ketimpangan diukur melalui indikator seperti Gini Index, Human Development Index (HDI), dan Sustainable Society Index, namun masing-masing memiliki keterbatasan dan perlu dikaji secara kontekstual (Zabala, 2019). Ketimpangan sering kali dianggap adil apabila dipersepsikan sebagai hasil proses yang adil, meskipun persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman (Rizzo & Killen, 2016).

Dalam perspektif pembangunan, pemerataan tidak hanya soal angka statistik tetapi juga persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lokal

dapat memperbaiki ketimpangan dengan meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan publik seperti ruang terbuka hijau dan pendidikan (Xiao et al., 2017). Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan, tetapi harus disertai pemahaman struktural tentang keadilan sosial (Kawet et al., 2019). Penerapan prinsip pemerataan dalam kebijakan nyata menjadi tantangan utama ke depan, terutama dalam menjamin kualitas layanan dasar yang merata di seluruh wilayah (Niessen et al., 2018).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Purwati dan Setyari, 2021). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Putri et al., 2025). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Roselin & Nainggolan, 2024). Ketimpangan pembangunan sering kali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah (Anwar et al., 2023; Arsitektur & Kebijakan, 2024).

Dinamika pertumbuhan kawasan perkotaan merupakan akibat dari pengaruh perkembangan faktor-faktor internal maupun eksternal, yang masing-masing akan saling terkait. Kota sebagai pusat pertumbuhan mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan kawasan yang ada di sekitarnya (Maria et al., 2023). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki luas wilayah 46.428,57 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, 640 kecamatan dan 8.464 desa yang mempunyai keragaman antar daerah. Keragaman antar daerah ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya (Fitriyah dan Lucky Rachmawati, 2013). Perbedaan karakteristik dan potensi antar wilayah melahirkan kawasan strategis yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian (Rahmat, 2020). Salah satu kawasan strategis yang terbentuk dari dinamika tersebut adalah kawasan Gerbangkertosusila.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila). Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbangkertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota (Fitriyah dan Lucky Rachmawati, 2013). PDRB kawasan Gerbangkertosusila dari tahun 2022 dan 2024 selalu mengalami kenaikan. Kota Surabaya, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian tetap menjadi pendukung utama dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2024, kota Surabaya memberikan kontribusi sebesar 25,77%, diikuti oleh Sidoarjo 9,02%, Gresik 6,33%, Kabupaten Mojokerto 3,74%, Lamongan, 1,71%, Bangkalan 0,93% dan Kota Mojokerto 0,30% (BPS Jawa Timur, 2024). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Gerbangkertosusila yang lain yang jauh dibawahnya. Sedangkan Lamongan, Bangkalan dan Kota Mojokerto berada di bawah rata-rata PDRB perkapita

Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengidentifikasi adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur.

Meskipun berbagai kajian sebelumnya telah membahas dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di kawasan Gerbangkertosusila, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengukuran disparitas ekonomi semata tanpa mengaitkannya dengan perumusan strategi lintas wilayah yang operasional (Harjanto & Sukowiyono, 2017). Belum terdapat integrasi analisis antara aspek pemerataan ekonomi dengan pendekatan strategis pembangunan kawasan metropolitan secara menyeluruh (Baidarus et al., 2018). Celah penelitian ini menjadi dasar bagi studi ini untuk merumuskan model pengembangan kawasan yang mengombinasikan analisis kuantitatif (Indeks Williamson sebagai ukuran disparitas) dengan analisis kualitatif (SWOT) guna menghasilkan strategi kebijakan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Tujuan spesifik penelitian ini adalah menyusun arahan penguatan konektivitas antardaerah, diversifikasi sektor unggulan berbasis potensi lokal, serta rekomendasi kelembagaan lintas kabupaten/kota yang mendukung terciptanya pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah Gerbangkertosusila.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana merumuskan “strategi pengembangan kawasan strategis Gerbangkertosusila berbasis pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur” yang akan berdampak positif pada perkembangan Provinsi Jawa Timur.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi berkembang secara tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Martin (2015) menyebutkan bahwa seiring waktu, teori ekonomi wilayah mengalami perkembangan untuk menjelaskan ketimpangan spasial, diversifikasi wilayah, dan resiliensi ekonomi terhadap guncangan global. Pendekatan awal seperti aglomerasi menekankan pada konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu karena adanya efisiensi biaya dan kedekatan geografis, tetapi tidak cukup menjelaskan ketimpangan jangka panjang (Iammarino et al., 2019). Oleh sebab itu, teori ini terus berkembang untuk menjawab dinamika globalisasi dan regionalisasi dalam konteks pembangunan wilayah.

Sebagai penyempurnaan, pendekatan *Evolutionary Economic Geography* hadir dengan menggabungkan teori evolusi dan transisi ekonomi wilayah. Boschma et al. (2017) menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi wilayah, baik terkait (*related variety*) maupun tidak terkait (*unrelated variety*), untuk mencapai ketahanan jangka panjang. Martin & Sunley (2015) menyebut dua jalur pertumbuhan wilayah yakni melalui penguatan sektor-sektor yang saling berhubungan serta eksplorasi sektor-sektor baru. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Hansen (2022) menekankan bahwa pendekatan *foundational economy* menjadi penting karena menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang merata seperti energi, pendidikan, dan air, bukan semata-mata pertumbuhan sektor unggulan.

Dalam konteks penelitian ini, teori pertumbuhan wilayah menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan perbedaan kinerja ekonomi antardaerah di kawasan metropolitan. Pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kapasitas produksi dan dinamika aktivitas ekonomi yang berkembang di tiap kabupaten/kota. Variasi PDRB antardaerah mencerminkan keberhasilan proses aglomerasi sebagaimana dijelaskan dalam teori pertumbuhan endogen dan evolutionary economic geography. Namun, teori tersebut juga menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang mengatur distribusi aktivitas ekonomi, wilayah dengan konsentrasi tinggi seperti Surabaya akan terus memperbesar kesenjangan dengan wilayah pinggiran. Oleh karena itu, PDRB tidak hanya dipandang sebagai ukuran pertumbuhan, tetapi juga sebagai representasi spasial dari intensitas ketimpangan yang menjadi dasar analisis pemerataan wilayah.

### **Konsep Pembangunan Wilayah Strategis**

Konsep pembangunan wilayah strategis metropolitan merupakan pendekatan perencanaan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan pemerataan dan keberlanjutan. Wilayah metropolitan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang mengintegrasikan kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan (Hariyoko, 2017). Dalam konteks ini, dibutuhkan kepemimpinan wilayah yang kuat untuk menetapkan arah kebijakan, menyusun visi dan misi pembangunan, serta mengoordinasikan lintas lembaga secara efektif (sulumiah et al., 2019). Pendekatan manajemen strategis dilakukan melalui tahapan identifikasi isu, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Beberapa elemen penting yang menentukan keberhasilan pembangunan wilayah strategis meliputi penguatan sektor unggulan, koordinasi tata kelola, pengembangan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Harjanto & Sukowiyono, 2017). Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berperan penting dalam mobilitas dan distribusi barang dan jasa (Baidarus et al., 2018). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting agar kebijakan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat (Santosa & Kholid, 2022). Tantangan utama pembangunan metropolitan adalah tumpang tindih kewenangan, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta tekanan terhadap lingkungan seperti alih fungsi lahan dan permukiman informal (Chandra, 2023).

Konsep pengembangan wilayah strategis metropolitan menekankan pentingnya sinergi antara pertumbuhan dan keseimbangan spasial dalam sistem wilayah. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut diukur melalui variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan sebagai refleksi langsung dari distribusi manfaat pertumbuhan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak otomatis diikuti oleh penurunan pengangguran dan kemiskinan apabila struktur ekonomi bersifat sektoral dan tidak inklusif. Dengan demikian, pendekatan pembangunan wilayah strategis perlu menempatkan TPT dan kemiskinan sebagai indikator sosial ekonomi yang memperlihatkan efektivitas pemerataan hasil pembangunan. Dalam kerangka ini, strategi lintas wilayah di Gerbangkertosusila diharapkan mampu menghubungkan pusat

pertumbuhan dengan hinterland-nya melalui mekanisme yang menekan kesenjangan sosial dan mendorong partisipasi ekonomi lokal.

### **Pemerataan Pembangunan dan Ketimpangan**

Pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi baik secara vertikal antar kelas sosial maupun horizontal antar wilayah. Ketimpangan dalam pendapatan, pendidikan, dan akses layanan publik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial (Trump, 2020). Ketimpangan diukur melalui indikator seperti Gini Index, Human Development Index (HDI), dan Sustainable Society Index, namun masing-masing memiliki keterbatasan dan perlu dikaji secara kontekstual (Zabala, 2019). Ketimpangan sering kali dianggap adil apabila dipersepsikan sebagai hasil proses yang adil, meskipun persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman (Rizzo & Killen, 2016).

Dalam perspektif pembangunan, pemerataan tidak hanya soal angka statistik tetapi juga persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lokal dapat memperbaiki ketimpangan dengan meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan publik seperti ruang terbuka hijau dan pendidikan (Xiao et al., 2017). Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan, tetapi harus disertai pemahaman struktural tentang keadilan sosial. Penerapan prinsip pemerataan dalam kebijakan nyata menjadi tantangan utama ke depan, terutama dalam menjamin kualitas layanan dasar yang merata di seluruh wilayah (Niessen et al., 2018).

Teori pemerataan pembangunan dan ketimpangan wilayah menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dioperasionalkan melalui pengukuran Indeks Williamson, yang merepresentasikan disparitas pendapatan per kapita antar wilayah dengan mempertimbangkan proporsi penduduk. Indeks ini menjadi alat analitis untuk menilai seberapa besar ketimpangan hasil pertumbuhan PDRB antar kabupaten/kota dalam kawasan Gerbangkertosusila. Dengan mengaitkan teori ketimpangan spasial dengan data empiris Indeks Williamson, penelitian ini menegaskan bahwa tingkat pemerataan bukan hanya diukur dari peningkatan ekonomi semata, tetapi dari proporsionalitas manfaat yang diterima oleh setiap wilayah. Hubungan ini penting untuk merumuskan strategi pembangunan lintas wilayah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengoreksi ketimpangan struktural secara berkelanjutan.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dan teknik analisis dalam penelitian ini mengacu pada sasaran yang telah dirumuskan. Berikut merupakan penjelasan mengenai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Indeks Williamson**

Ketimpangan regional merupakan salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu tokoh yang secara mendalam membahas dinamika ini adalah Jeffrey G.

Williamson, melalui karyanya yang berjudul "*Regional Inequality and the Process of National Development*" (1965). Dalam publikasi tersebut, Williamson mengemukakan bahwa ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, kemudian menurun seiring dengan kematangan ekonomi nasional—sebuah pola yang kemudian dikenal sebagai hipotesis kurva-U terbalik dalam ketimpangan regional (Williamson, 1965).

Untuk mengukur disparitas antar wilayah tersebut, Williamson mengembangkan suatu indikator yang dikenal sebagai Indeks Williamson. Indeks ini merupakan pengukuran statistik yang memperhitungkan perbedaan pendapatan per kapita antar wilayah dengan mempertimbangkan proporsi penduduk masing-masing wilayah. Rumus dasar dari Indeks Williamson yakni:

$$W = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (y_i - \bar{y})^2}{\bar{y}^2 n}}$$

Keterangan:

- $f_i$  adalah proporsi penduduk wilayah ke-i terhadap total populasi,
- $y_i$  adalah pendapatan per kapita wilayah ke-i,
- $\bar{y}$  adalah pendapatan per kapita nasional,
- dan  $n$  adalah jumlah wilayah yang dianalisis.

## SWOT

Menurut Rangkuti (2003), SWOT adalah akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman). Analisis SWOT yaitu analisis berdasarkan logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

### 1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan adalah faktor-faktor atau kompetensi yang menjadi keunggulan perusahaan dibanding perusahaan lain. Kompetensi khusus menjadi salah satu faktor kekuatan dimana hal ini organisasi yang dibangun memiliki keunggulan secara komparatif pada unit usaha yang ada di pasaran.

### 2. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan yaitu suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seseorang dalam melakukan keinerja organisasi, dengan segala keterbatasan atau kekurangan dari berbagai faktor.

### 3. *Opportunity* (Peluang)

Peluang adalah situasi kondisi yang ada dan dapat dieksplorasi menjadi suatu keuntungan.

### 4. *Threat* (Ancaman)

Ancaman adalah berbagai indikasi di lingkungan yang tidak menguntungkan dan bila tidak diberantas akan menghambat atau membahayakan kinerja

Matrik SWOT memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menghadapi berbagai peluang dan ancaman dengan kekuatan serta kelemahan yang ada pada perusahaan. Matrik SWOT sebagai media pencocokan untuk mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO, WO, ST dan WT.

1. Strategi SO

Strategi yang diciptakan sesuai jalan pikiran dan keinginan perusahaan. Menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada.

2. Strategi ST

Strategi dalam mengatasi kerugian yang akan terjadi dengan menciptakan kekuatan yang ada.

3. Strategi WO

Strategi yang dibuat dengan meminimalkan kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang.

4. Strategi WT

Strategi yang dibuat bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada.

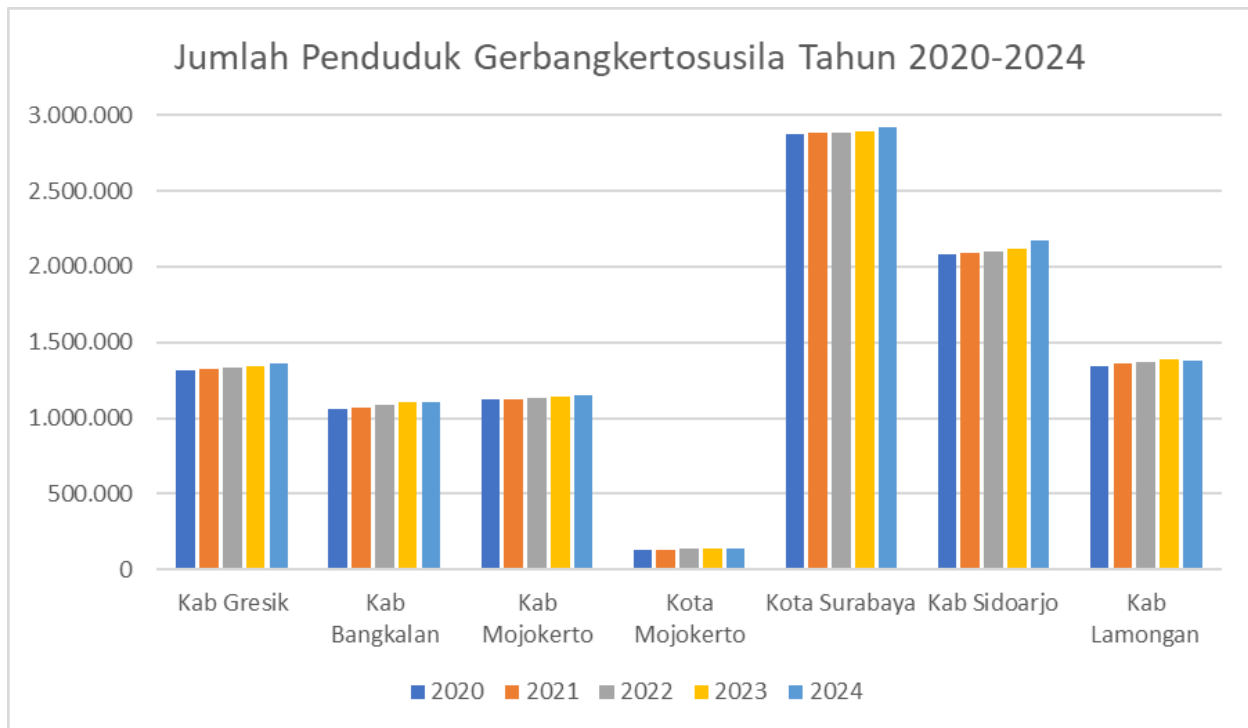
Dalam penelitian ini, penyusunan analisis SWOT dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Input data SWOT diperoleh dari hasil perhitungan indikator ekonomi wilayah (PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan) menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, serta hasil pengolahan Indeks Williamson sebagai ukuran disparitas antarwilayah. Data tersebut kemudian dianalisis bersama temuan dari studi literatur akademik dan dokumen kebijakan, seperti Perpres No. 66 Tahun 2022 dan Perpres No. 80 Tahun 2019, yang memberikan dasar normatif dan strategis bagi pengembangan kawasan Gerbangkertosusila. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang teridentifikasi memiliki dasar empiris dan kontekstual yang kuat, sehingga strategi yang dihasilkan bersifat aplikatif, berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan relevan dengan kondisi aktual wilayah metropolitan (PERPRES No. 66 Tahun 2022.; PERPRES No. 80 Tahun 2019).

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Dampak Kebijakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

##### **Kependudukan**

Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) merupakan wilayah strategis nasional di Jawa Timur yang memiliki konsentrasi penduduk tinggi. Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu karakteristik utama kawasan ini, seiring dengan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mencerminkan dinamika urbanisasi dan mobilitas antarwilayah yang tinggi, terutama di kota-kota inti seperti Surabaya dan Sidoarjo. Berikut ini jumlah penduduk di Gerbangkertosusila tahun 2020-2024.



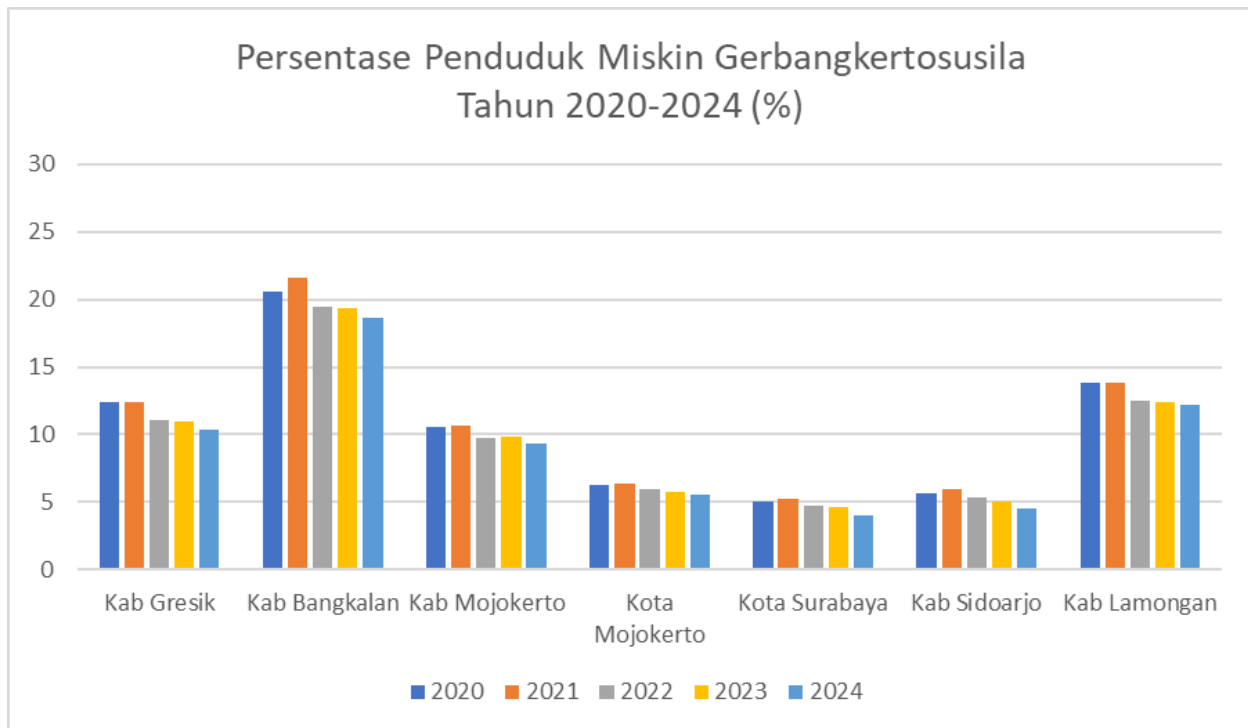
*Sumber: BPS, 2025*

Gambar 1. Jumlah Penduduk Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024

Jumlah penduduk di kawasan Gerbangkertosusila mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Kota Surabaya tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 2,92 juta jiwa pada tahun 2024. Disusul oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang masing-masing mencatat lebih dari 2,17 juta jiwa dan 1,36 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk juga terlihat stabil di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan. Sementara itu, pertumbuhan di Kabupaten Bangkalan cenderung stagnan sejak 2023. Pola ini menunjukkan tingginya laju urbanisasi dan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota inti seperti Surabaya dan Sidoarjo, yang berimplikasi pada kebutuhan perencanaan wilayah dan pelayanan dasar yang semakin kompleks.

### **Kemiskinan**

Wilayah Gerbangkertosusila yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan merupakan kawasan strategis di Jawa Timur dengan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. Meskipun kawasan ini menunjukkan perkembangan pesat dalam bidang industri, perdagangan, dan infrastruktur, persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan serius. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah pembangunan yang masif menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasil pertumbuhan tersebut secara merata. Berikut ini persentase penduduk miskin gerbangkertosusila tahun 2020-2024



*Sumber: BPS, 2025*

**Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024**

Secara umum, seluruh wilayah di kawasan Gerbangkertosusila mengalami penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2020–2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, meskipun laju penurunannya bervariasi di tiap daerah. Kota Surabaya konsisten menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah, turun dari 5,02% pada tahun 2020 menjadi hanya 3,96% pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Bangkalan mencatatkan angka kemiskinan tertinggi sepanjang periode tersebut, meskipun berhasil menurunkannya dari 21,57% pada tahun 2021 menjadi 18,66% pada 2024. Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto juga menunjukkan tren penurunan yang cukup stabil. Namun, Kabupaten Lamongan mencatat penurunan yang lambat, dengan persentase penduduk miskin masih berada di angka 12,16% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya kecuali Bangkalan. Tren ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila, walaupun masih diperlukan upaya lebih besar di beberapa daerah untuk menyamai pencapaian kota-kota dengan angka kemiskinan rendah.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Kawasan Gerbangkertosusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi strategis di Jawa Timur. Meskipun kawasan ini dikenal sebagai episentrum kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, permasalahan ketenagakerjaan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan yang signifikan. TPT mencerminkan jumlah angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan

ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Perbedaan struktur ekonomi antar wilayah di kawasan ini turut mempengaruhi fluktuasi TPT. Kota Surabaya sebagai pusat metropolitan memiliki dinamika tenaga kerja yang berbeda dibandingkan wilayah penyangga seperti Bangkalan atau Lamongan yang lebih agraris dan semi-industri.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024 (%)

| Kab/Kota       | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|-------|-------|------|------|------|
| Kab Gresik     | 8,21  | 8,00  | 7,84 | 6,82 | 6,45 |
| Kab Bangkalan  | 8,77  | 8,07  | 8,05 | 6,18 | 5,35 |
| Kab Mojokerto  | 5,75  | 5,54  | 4,83 | 4,67 | 3,87 |
| Kota Mojokerto | 6,74  | 6,87  | 5,05 | 4,73 | 3,76 |
| Kota Surabaya  | 9,79  | 9,68  | 7,62 | 6,76 | 4,91 |
| Kab Sidoarjo   | 10,97 | 10,87 | 8,80 | 8,05 | 6,49 |
| Kab Lamongan   | 5,13  | 4,90  | 6,05 | 5,46 | 4,34 |

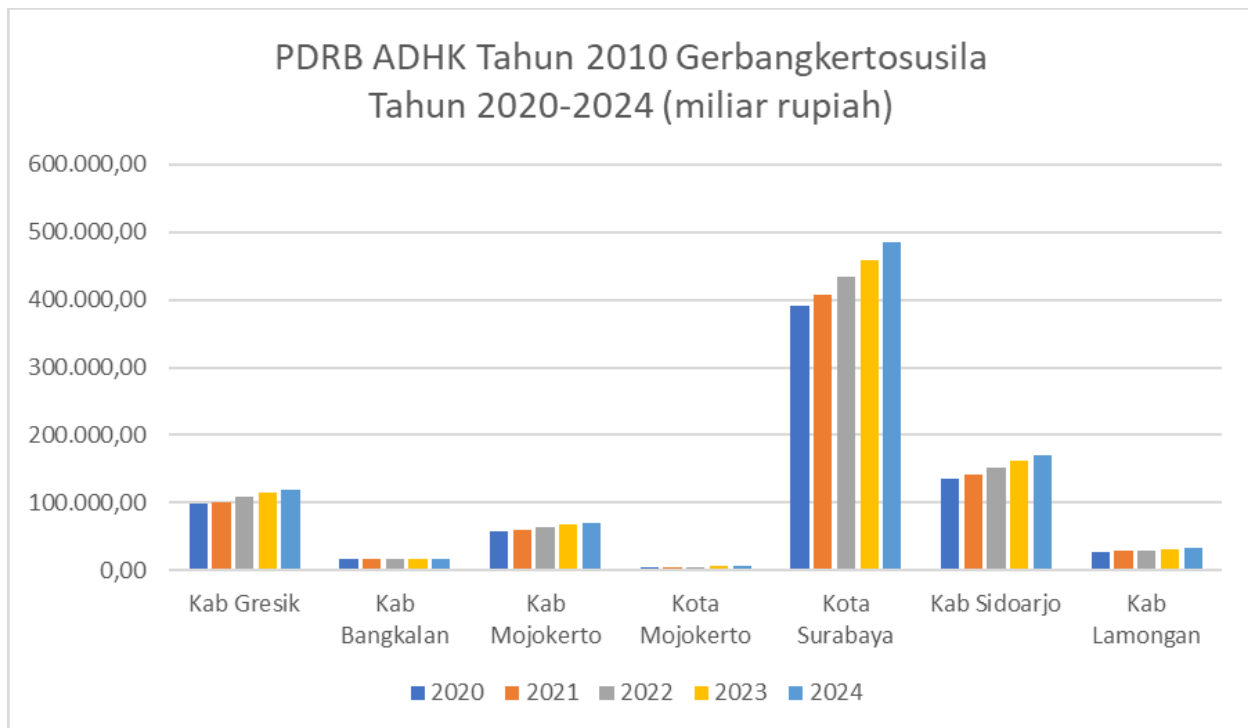
*Sumber: BPS, 2025*

Data pada Tabel diatas menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di seluruh wilayah Gerbangkertosusila selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo mencatatkan TPT tertinggi, masing-masing sebesar 9,79% dan 10,97% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut menurun secara konsisten hingga mencapai 4,91% dan 6,49% pada tahun 2024. Sementara itu, wilayah dengan TPT terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Lamongan (5,13%), dan terus mengalami penurunan menjadi 4,34% pada tahun 2024. Pola serupa juga terlihat di kabupaten/kota lainnya seperti Mojokerto (kabupaten dan kota), Gresik, dan Bangkalan yang menunjukkan tren penurunan TPT secara signifikan. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antar wilayah, terutama antara pusat kota seperti Surabaya dan wilayah hinterland lainnya. Hal ini menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Di kawasan Gerbangkertosusila, yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, PDRB mencerminkan kontribusi masing-masing daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

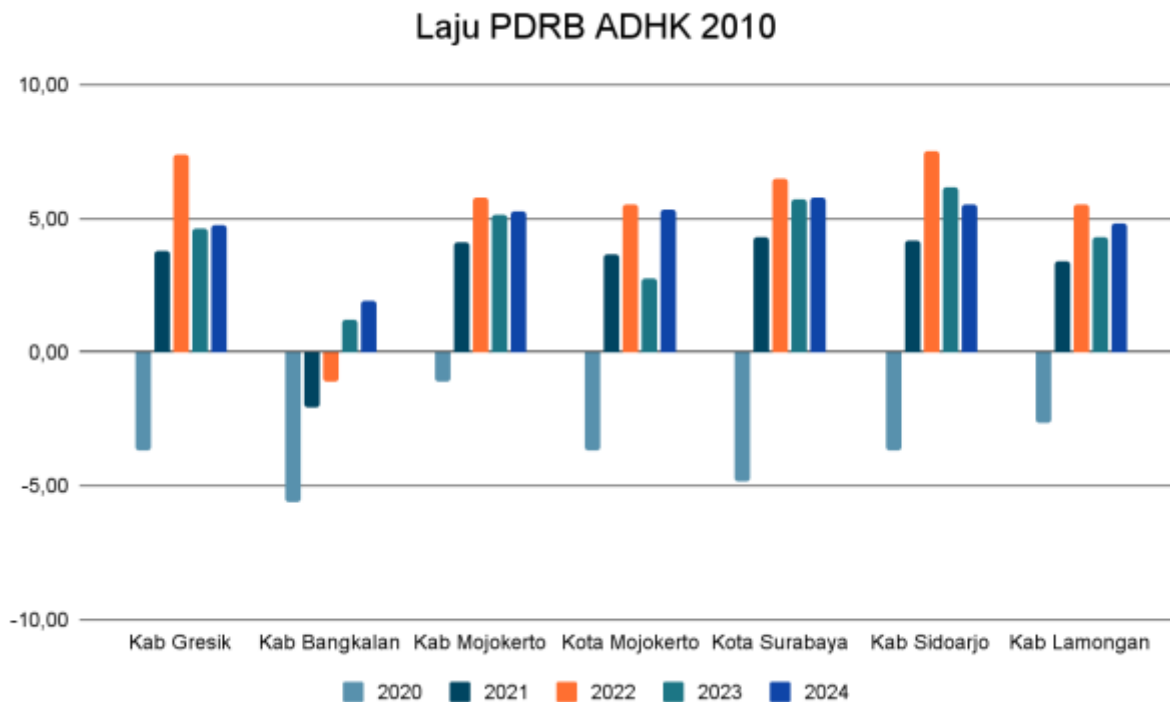
secara keseluruhan. Sebagai kawasan strategis dan pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dinamika PDRB di wilayah ini menunjukkan tingkat produktivitas ekonomi yang signifikan, namun tidak merata.



*Sumber: BPS, 2025*

Gambar 3. PDRB ADHK 2010 Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Selama periode 2020 hingga 2024, kawasan Gerbangkertosusila mengalami pertumbuhan ekonomi riil yang konsisten, tercermin dari peningkatan PDRB atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) di seluruh kabupaten/kota. Kota Surabaya tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi regional dengan PDRB meningkat dari Rp390.936,43 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp485.448,89 miliar pada 2024. Peningkatan signifikan juga terlihat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, yang masing-masing mencatatkan PDRB sebesar Rp169.867,80 miliar dan Rp119.274,42 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, wilayah dengan PDRB riil terendah adalah Kota Mojokerto, meskipun tetap mengalami kenaikan dari Rp4.801,46 miliar pada 2020 menjadi Rp5.686,79 miliar pada 2024. Secara umum, tren positif di seluruh wilayah menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan ini selama lima tahun terakhir.



*Sumber: BPS, 2025*

Gambar 4. Laju PDRB ADHK 2010 Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024 (%)

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi riil di kawasan Gerbangkertosusila menunjukkan pemulihan yang signifikan pasca kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020, dengan penurunan terdalam dialami oleh Kabupaten Bangkalan (-5,59%) dan Kota Surabaya (-4,85%). Mulai tahun 2021, hampir seluruh wilayah menunjukkan pemulihan bertahap. Pertumbuhan tertinggi dalam periode ini tercatat di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 6,16%, diikuti Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 5,76%. Secara konsisten, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto mencatatkan tren pertumbuhan yang stabil dan meningkat, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan tahunan di atas 5% dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan progresif di wilayah Gerbangkertosusila setelah dampak awal pandemi, meskipun kecepatan pemulihan bervariasi antar wilayah.

### **Evaluasi Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial**

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan/pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengukur ketimpangan di Gerbangkertosusila, digunakan indeks williamson.

#### **Indeks Williamson**

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau PDRB per kapita antar wilayah dalam suatu negara atau daerah. Indeks ini memperhitungkan jumlah penduduk dari masing-masing wilayah.

Tabel 2. Nilai PDRB Perkapita Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024

| Kabupaten/<br>Kota | PDRB Perkapita (Rupiah Per Tahun) |                             |                             |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    | 2020                              | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| Surabaya           | 136.010.192.345.<br>175,00        | 141.557.221.440.<br>.952,00 | 150.410.272.124.<br>.154,00 | 158.630.928.314.<br>.123,00 | 167.760.422.822.<br>.603,00 |
| Kota Mojokerto     | 36.252.019.877.5<br>23,90         | 37.337.175.104.<br>222,90   | 39.099.367.324.<br>153,30   | 39.870.323.604.<br>797,10   | 41.989.749.957.<br>833,00   |
| Gresik             | 74.446.982.379.3<br>96,20         | 76.722.930.250.<br>338,90   | 81.637.982.267.<br>758,40   | 84.650.406.649.<br>494,90   | 88.702.768.308.<br>449,50   |
| Bangklan           | 16.516.767.150.3<br>81,40         | 16.004.299.663.<br>323,70   | 15.607.111.962.<br>700,90   | 15.581.595.488.<br>745,00   | 15.883.895.145.<br>140,20   |
| Kab. Mojokerto     | 51.659.698.948.4<br>71,60         | 53.484.516.518.<br>291,10   | 57.956.887.183.<br>340,60   | 58.678.108.761.<br>226,30   | 61.783.628.088.<br>130,20   |
| Sidoarjo           | 64.962.999.345.7<br>46,40         | 67.401.872.911.<br>789,60   | 72.079.931.501.<br>829,70   | 76.114.117.738.<br>670,60   | 80.331.014.835.<br>987,00   |
| Lamongan           | 20.065.988.922.9<br>74,50         | 20.571.861.770.<br>112,30   | 21.470.511.677.<br>604,70   | 22.141.533.057.<br>412,00   | 23.205.745.594.<br>765,70   |

Sumber : Analisa Penulis, 2025

Nilai Indeks Williamson yang ditampilkan pada Tabel 9 diperoleh berdasarkan perhitungan PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Tabel 3 Nilai Indeks Williamson Gerbangkertosusila Tahun 2020-2024

| Tahun | Indeks Williamson | Keterangan        |
|-------|-------------------|-------------------|
| 2020  | 0,8258            | Disparitas Tinggi |
| 2021  | 0,8357            | Disparitas Tinggi |
| 2022  | 0,8393            | Disparitas Tinggi |
| 2023  | 0,8569            | Disparitas Tinggi |

|                  |               |                          |
|------------------|---------------|--------------------------|
| 2024             | 0,8631        | Disparitas Tinggi        |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>0,8442</b> | <b>Disparitas Tinggi</b> |

Sumber : Analisa Penulis, 2025

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila dalam analisis, indeks mendekati angka 0 artinya ketimpangan rendah sedangkan jika indeks mendekati angka 1 berarti tingkat ketimpangan di suatu wilayah dikatakan tinggi, atau secara tidak langsung telah terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi (Williamson, 1965).

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Indeks Williamson, terlihat bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antardaerah di Kawasan Strategis Gerbangkertosusila yang tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari nilai indeks yang mendekati angka 1, yang menunjukkan tingginya disparitas antar wilayah. Jika dilihat secara lebih rinci, nilai indeks pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,8569 dan 0,8631. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang paling tinggi dalam periode yang dianalisis, bahkan melampaui rata-rata ketimpangan antar tahun.

Sementara itu, nilai ketimpangan paling rendah tercatat pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,8258. Meskipun demikian, angka ini masih berada dalam kategori ketimpangan tinggi. Dengan kata lain, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2024), tidak terdapat tren penurunan yang signifikan terhadap nilai Indeks Williamson. Sebaliknya, disparitas antar wilayah di kawasan Gerbangkertosusila justru cenderung meningkat, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan lebih banyak terpusat di wilayah tertentu saja.



Sember : Analisa Penulis, 2025

Gambar 5. Grafik Nilai Indeks Williamson Gerbangkertosusila 2020-2024

Tingginya ketimpangan pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila dipicu oleh kesenjangan besar PDRB per kapita antar wilayah. Surabaya sebagai pusat ekonomi mencatat PDRB per kapita Rp 167,76 triliun pada 2024, jauh melampaui wilayah lain seperti Bangkalan (Rp 15,88 triliun atau 9,5% dari Surabaya) dan Lamongan (Rp 23,21 triliun atau 13,8%). Surabaya dan Sidoarjo menunjukkan pertumbuhan kuat dan konsisten, sementara wilayah seperti Bangkalan stagnan atau menurun. Ketimpangan ini diperparah oleh konsentrasi ekonomi dan penduduk di Surabaya-Sidoarjo (menampung 51,7% dari total 9,84 juta jiwa), menyebabkan struktur pembangunan timpang dan menaikkan Indeks Williamson menjadi 0,8631 pada 2024.

### **Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat (SWOT)**

Berdasarkan hasil dari data penelitian terdahulu dan data BSPS, maka dibentuk analisis SWOT menentukan strategi pengembangan Kawasan strategis Gerbangkertosusila melalui matriks SWOT. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari Analisis SWOT Gerbangkertosusila.

Tabel 4. Analisa SWOT Gerbangkertosusila

| <b><i>Strengths</i><br/>(Kekuatan)</b>                                                                                                                                                           | <b><i>Weaknesses</i><br/>(Kelemahan)</b>                                                                                                                                  | <b><i>Opportunities</i><br/>(Peluang)</b>                                                                                                                                                                   | <b><i>Threats</i> (Ancaman)</b>                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kawasan Metropolitan Strategis:</b><br>Gerbangkertosusila adalah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki posisi penting dalam pembangunan Jawa Timur, dengan Kota Surabaya sebagai pusatnya. | <b>Tingkat Pengangguran Terdidik Tinggi:</b><br>Banyak lulusan SMA dan sarjana yang menganggur karena memilih pekerjaan sesuai ekspektasi gaji dan status                 | <b>Peluang Investasi Merata:</b> Wilayah yang selama ini kurang berkembang seperti Bangkalan atau Kota Mojokerto masih memiliki potensi besar untuk investasi baru.                                         | <b>Ketergantungan pada Sektor Tertentu:</b><br>Konsentrasi ekonomi di sektor perdagangan dan industri tanpa diversifikasi bisa menimbulkan kerentanan.            |
| <b>Pertumbuhan Ekonomi Positif:</b><br>Secara simultan, tenaga kerja, dan pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi                                                            | <b>Ketergantungan pada Surabaya</b><br>Ketimpangan antardaerah tinggi, dengan Surabaya sebagai pusat dominan. Daerah pinggiran memiliki kontribusi ekonomi relatif rendah | <b>Pengembangan Infrastruktur Terpadu</b><br>Gerbangkertosusila memiliki potensi besar untuk mengembangkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur guna meningkatkan distribusi ekonomi yang lebih merata. | <b>Urbanisasi dan Kepadatan:</b><br>Pertumbuhan Surabaya sebagai pusat dapat menimbulkan tekanan infrastruktur dan layanan dasar jika tidak dikelola dengan baik. |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kualitas Pendidikan Meningkat:</b> Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan di seluruh kabupaten/kota dalam kawasan ini, menunjukkan perbaikan kualitas SDM</p>                                                             | <p><b>Ketimpangan Ekonomi Tinggi antar Wilayah</b><br/>Williamson Index di kawasan GKS berada di angka 0.863, tergolong tinggi. Surabaya memiliki PDRB per kapita lima kali lebih tinggi dibanding Bangkalan dan Lamongan.</p> | <p><b>Dukungan regulasi lintas wilayah</b> untuk mengintegrasikan pusat dan wilayah sekitarnya</p>                                                    | <p><b>Ketimpangan Investasi:</b> Terjadi konsentrasi investasi di beberapa wilayah saja, sehingga kabupaten lain seperti Bangkalan dan kota Mojokerto tertinggal</p>                    |
| <p><b>Pertumbuhan Ekonomi Stabil dan Konsisten</b><br/>PDRB di kawasan Gerbangkertosusila (2020-2024) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi</p>                       | <p><b>Tingginya Angka Kemiskinan</b> di Daerah Bangkalan masuk dalam kategori daerah miskin ekstrem di Jawa Timur tahun 2024</p>                                                                                               | <p><b>Kebijakan nasional untuk pemerataan pembangunan</b> – Regulasi seperti Perda Jatim dan PP mendukung pengembangan Kawasan Gerbangkertosusila</p> | <p><b>Potensi Konflik Tata Ruang dan Lahan</b><br/>Urbanisasi dan konversi lahan besar-besaran dapat menimbulkan konflik tata guna lahan dan degradasi lingkungan di pinggiran kota</p> |
| <p><b>Kontribusi Ekonomi Besar terhadap Jawa Timur</b><br/>Kawasan GKS menyumbang lebih dari 40% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, menandakan kawasan ini sangat produktif dan kompetitif secara ekonomi</p> | <p><b>Tingginya Ketimpangan Pendapatan</b><br/>Indeks Gini menunjukkan ketimpangan tinggi di kota besar seperti Surabaya (Gini Ratio 0,388), menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata</p>                           | <p><b>Penguatan industri pengolahan dan manufaktur</b> – memanfaatkan momentum nasional, seperti unggulan sektor makanan/minuman secara nasional</p>  | <p><b>Krisis global/transformasi digital</b> dapat mengguncang basis manufaktur eksisting, jika daerah tidak siap adaptif.</p>                                                          |
| <p><b>Keberagaman Sektor Unggulan Tiap Wilayah</b><br/>Setiap kabupaten/kota di</p>                                                                                                                                                   | <p><b>Ketimpangan Regional Ekonomi</b><br/>Disparitas antara pusat dan daerah pinggiran berpotensi</p>                                                                                                                         | <p><b>Kemunculan klaster baru dan pusat pertumbuhan</b> di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto memberi</p>                                                    | <p><b>Efek Trickle-down yang Lemah:</b><br/>Pertumbuhan ekonomi tidak merata, manfaat tidak</p>                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GKS memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda<br>Keberagaman ini membuka peluang sinergi antar wilayah                                                                                                                                                     | menciptakan ketimpangan sosial dan memperlemah integrasi wilayah.                                                                                                                                                                                                                          | alternatif selain Surabaya                                                                                            | mengalir ke masyarakat miskin/wilayah pinggiran |
| <b>Peningkatan Integrasi Antar Pelaku Ekonomi</b><br>Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil (ABGC), inovasi dan produktivitas bisa ditingkatkan                                                               | <b>Tidak Semua Daerah Punya Sektor Unggulan yang kuat</b><br>Bangkalan<br>Pertumbuhan ekonomi stagnan, Lamongan<br>Pertumbuhan lambat dan belum menunjukkan sektor dominan yang mendorong percepatan ekonomi, Kabupaten Mojokerto Sektor unggulan belum terlihat menonjol secara regional. | <b>Perkembangan sektor non-basis</b> di Sidoarjo seperti listrik, perdagangan, hotel-restoran bisa menjadi basis baru |                                                 |
| <b>Penguatan Program Pemerataan Pendapatan dan Ketenagakerjaan</b><br>Dengan mengetahui bahwa pengangguran signifikan mempengaruhi ketimpangan, intervensi seperti pelatihan kerja, kewirausahaan, dan perluasan lapangan kerja dapat mengurangi disparitas |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Potensi pengurangan kemiskinan</b> – kabupaten pinggiran memiliki ruang besar untuk didorong program inklusif      |                                                 |

**Sumber : Analisa Penulis, 2025**

Berdasarkan identifikasi diatas, disusunlah strategi-strategi dalam matriks SWOT (SO, WO, ST, WT) untuk mengarahkan intervensi kebijakan yang tepat dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 5. Matriks SWOT Gerbangkertosusila

| Strategi SO                                                                                                                                                                           | Strategi ST                                                                                                                                                                     | Strategi WO                                                                                                                                                                 | Strategi WT                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pusat Pertumbuhan Multikutub</b><br>Manfaatkan status kawasan strategis nasional dan klaster baru di Gresik/Sidoarjo untuk ciptakan pusat pertumbuhan alternatif di luar Surabaya. | <b>Diversifikasi Ekonomi Berbasis Sektor Lokal</b><br>Memanfaatkan keberagaman sektor unggulan untuk kurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan antisipasi krisis global . | <b>Pengurangan Kemiskinan via Investasi Inklusif</b><br>Atasi kemiskinan ekstrem Bangkalan dengan akselerasi investasi merata dan program pelatihan berbasis sektor lokal . | <b>Stabilisasi Investasi Daerah Rentan</b><br>Antisipasi fluktuasi investasi di Bangkalan/Mojokerto dengan skema insentif dan mitigasi risiko lahan         |
| <b>Sinergi Sektor Unggulan Berbasis Infrastruktur</b><br>Hubungkan sektor unggulan tiap wilayah melalui pengembangan infrastruktur terpadu untuk ciptakan rantai pasok regional.      | <b>Mitigasi Urbanisasi via Pertumbuhan Polisentris</b><br>Alihkan tekanan urbanisasi Surabaya dengan memperkuat pusat pertumbuhan baru di daerah pinggiran                      | <b>Pemerataan Pertumbuhan via Konektivitas</b><br>Kurangi ketergantungan pada Surabaya dengan bangun infrastruktur terpadu yang hubungkan daerah pinggiran                  | <b>Pencegahan kehilangan talenta lokal</b><br>Atasi urbanisasi massal dan pengangguran terdidik dengan menciptakan <i>pusat inovasi</i> di daerah pinggiran |
| <b>Investasi Merata Berbasis SDM</b><br>Manfaatkan peningkatan kualitas pendidikan dan peluang investasi di daerah tertinggal untuk bangun industri berbasis keahlian lokal.          | <b>Pencegahan Konflik Lahan Berbasis Tata Ruang</b><br>Gunakan pertumbuhan ekonomi stabil untuk desain tata ruang berkelanjutan yang antisipasi konversi lahan                  | <b>Penyerapan Pengangguran Terdidik</b><br>Atasi pengangguran terdidik melalui pengembangan klaster baru dan program kewirausahaan berbasis ABGC.                           | <b>Proteksi Ekonomi Rentan</b><br>Lindungi wilayah miskin dari efek trickle-down lemah melalui program padat karya berbasis infrastruktur lokal..           |
| <b>Integrasi Ekonomi ABGC</b><br>Optimalkan kontribusi ekonomi besar dan kolaborasi quadruple helix untuk percepat inovasi sektor produktif.                                          | <b>Penguatan Ketahanan Ekonomi</b><br>Manfaatkan kontribusi ekonomi besar untuk bangun sistem logistik terintegrasi yang kurangi kerentanan                                     | <b>Penguatan Sektor Unggulan Daerah Tertinggal</b><br>Bangun sektor unggulan di daerah tanpa basis ekonomi kuat dengan dukungan regulasi lintas wilayah .                   | <b>Diversifikasi Ekonomi Pinggiran</b><br>Kurangi ketergantungan sektor tradisional di Lamongan/Bangkalan dengan kembangkan sektor non-basis                |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | sektor tertentu.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <b>Pemerataan Berbasis Regulasi Nasional</b><br>Manfaatkan kebijakan nasional pemerataan dan pertumbuhan ekonomi stabil untuk alokasikan investasi strategis ke Bangkalan/Lamongan | <b>Transformasi Digital Inklusif</b><br>Manfaatkan SDM terdidik untuk adaptasi transformasi digital melalui pelatihan sektor unggulan lokal. | <b>Penurunan Ketimpangan via Program Afirmatif</b><br>Atasi ketimpangan pendapatan dengan intervensi pelatihan kerja dan insentif fiskal untuk UMKM pinggiran. | <b>Pemutusan Siklus Ketimpangan</b><br>Cegah disparitas sosial dengan integrasi program pengentasan kemiskinan dan pemerataan investasi |

Sumber : Analisa Penulis, 2025

### Analisis Gap dan Rencana Strategis Pengembangan

Berikut ini disajikan analisis gap antara hasil *analisis* dengan arah kebijakan pembangunan dalam Perpres No. 66 Tahun 2022 dan Perpres No. 80 Tahun 2019. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual kawasan dengan rencana strategis nasional, agar dapat dirumuskan strategi pengembangan yang lebih relevan dan efektif.

**Tabel 6. Analisis Gap antara Hasil Analisis dengan Perpres 66/2022 dan Perpres 80/2019**

| Aspek                         | Analisis                                                                                                                                             | Arah Perpres        | Keterangan Perpres                                                                                                                                     | Gap yang Teridentifikasi                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemerataan Pembangunan</b> | Indeks Williamson > 0,84 selama 2020–2024, menunjukkan disparitas tinggi antara pusat (Surabaya) dan pinggiran (Bangkalan, Lamongan, Kota Mojokerto) | Perpres No. 66/2022 | Tujuan pembangunan kawasan adalah untuk "mewujudkan pusat ekonomi nasional dan kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan" (Pasal 3 huruf a) | Tidak ada fokus eksplisit pada <i>mekanisme pemerataan manfaat pertumbuhan</i> antardaerah di dalam kawasan |

|                                                  |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sektor Unggulan Ekonomi</b>                   | Dominasi sektor industri, konstruksi, dan perdagangan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo; wilayah lain minim penguatan sektor unggulan | Perpres No. 66/2022 | Menyebut 13 sektor unggulan kawasan: industri, pertanian, kehutanan, perikanan, jasa, pariwisata, transportasi, energi, dll (Pasal 5 ayat 2) | Implementasi di lapangan masih menunjukkan konsentrasi sektor pada wilayah inti tanpa peta jalan transformasi sektoral di wilayah pinggiran |
| <b>Infrastruktur dan Konektivitas</b>            | Akses transportasi, layanan dasar, dan digital belum merata; Bangkalan dan Lamongan kurang tersambung secara efektif                  | Perpres No. 80/2019 | Menetapkan proyek strategis: Tol Tengah, LRT Surabaya, SERR, Regional Railway Line untuk percepatan ekonomi kawasan (Lampiran I dan II)      | Tidak ada evaluasi pemerataan infrastruktur lintas wilayah; proyek cenderung bias ke kawasan inti (Surabaya–Sidoarjo–Gresik)                |
| <b>Pembangunan SDM</b>                           | Angka pengangguran terdidik tinggi, khususnya di Mojokerto dan Bangkalan; kurang pelatihan kerja berbasis wilayah                     | Perpres No. 80/2019 | Terdapat program pengembangan SDM, namun hanya dijelaskan secara umum (Lampiran II bagian Program Prioritas)                                 | Tidak ada skema terarah yang mengaitkan pengembangan SDM dengan potensi lokal dan disparitas wilayah dalam kawasan                          |
| <b>Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Wilayah</b> | Efek backwash dari Surabaya kuat; kolaborasi antar daerah lemah; ketimpangan terus berlanjut                                          | Perpres No. 66/2022 | Mengatur pembentukan "Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan                                                                         | Forum koordinasi bersifat normatif dan belum menunjukkan efektivitas dalam distribusi peran dan sumber daya antar wilayah                   |

|                                 |                                                                                                             |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                             |                     | Gerbangkertosusila" (Pasal 7)                                                                        |                                                                                                                                                  |
| <b>Keberlanjutan Lingkungan</b> | Tekanan lingkungan akibat urbanisasi tinggi tidak dianalisis dalam dokumen; belum ada integrasi daya dukung | Perpres No. 66/2022 | Penataan ruang harus "memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup" (Pasal 3 huruf c) | Peraturan menekankan prinsip keberlanjutan, namun belum diterjemahkan ke dalam strategi lingkungan berbasis wilayah yang operasional dan terukur |

Sumber: Analisa Penulis, 2025

Tabel analisis gap menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan strategis nasional dalam Perpres No. 66 Tahun 2022 dan Perpres No. 80 Tahun 2019 dengan kondisi faktual di lapangan, di mana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah inti seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, sementara daerah pinggiran seperti Bangkalan, Lamongan, dan Kota Mojokerto tertinggal dalam kontribusi ekonomi, akses infrastruktur, dan kualitas SDM. Ketimpangan ini berisiko memperbesar kesenjangan antarwilayah apabila tidak disertai intervensi pemerataan yang terukur, seperti pengembangan infrastruktur yang juga menguntungkan wilayah pinggiran serta strategi penguatan SDM lokal. Selain itu, kelembagaan dan keberlanjutan lingkungan masih bersifat normatif tanpa kebijakan operasional yang jelas, menyebabkan lambatnya penanganan tata ruang dan tekanan ekologis akibat urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut kebijakan yang konkret, berbasis data ketimpangan, dengan strategi sektoral khusus di wilayah tertinggal serta penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota untuk menjamin implementasi yang efektif.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Gerbangkertosusila mencerminkan dinamika sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis kurva-U terbalik Williamson, di mana ketimpangan regional meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebelum berangsur menurun setelah tercapainya kematangan struktur ekonomi. Dalam konteks kawasan ini, peningkatan nilai Indeks Williamson dari 0,8258 pada tahun 2020 menjadi 0,8631 pada tahun 2024 menggambarkan fase akselerasi pertumbuhan yang masih terkonsentrasi pada wilayah inti seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, sementara daerah penyangga belum sepenuhnya menikmati limpahan manfaat (trickle-down effect) dari ekspansi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa kawasan Gerbangkertosusila saat ini masih berada pada sisi naik dari kurva-U terbalik, di mana intensitas aglomerasi ekonomi memperbesar kesenjangan spasial. Namun demikian, hasil analisis SWOT dan strategi yang dirumuskan dalam penelitian ini memperlihatkan peluang untuk menggeser kawasan menuju sisi menurun kurva, yakni fase pemerataan, melalui penguatan

konektivitas, diversifikasi sektor unggulan wilayah pinggiran, serta peningkatan investasi berbasis potensi lokal yang mampu memperluas distribusi manfaat pertumbuhan secara lebih inklusif. Dengan demikian, temuan empiris tidak hanya mendukung teori Williamson, tetapi juga menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan lintas wilayah untuk mempercepat transisi menuju keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan di kawasan metropolitan.

### **Perumusan Strategi Pengembangan Kawasan**

Melalui analisis di atas, kita dapat memilih strategi kombinasi dari hasil analisis SWOT untuk menjawab kesenjangan antara kondisi aktual kawasan Gerbangkertosusila dengan arah kebijakan nasional dalam Perpres No. 66 Tahun 2022 dan Perpres No. 80 Tahun 2019. Strategi yang dipilih mencakup pendekatan ofensif, adaptif, defensif, dan korektif, guna merespons kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang saling berinteraksi. Adapun strategi yang dipilih antara lain:

1. Membangun sistem rantai pasok regional yang terhubung antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur terpadu yang mendukung penguatan sektor unggulan lokal secara fungsional dan spasial.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan alternatif di luar Surabaya dengan memanfaatkan status kawasan strategis nasional serta potensi klaster industri baru di Gresik dan Sidoarjo untuk menyeimbangkan struktur wilayah metropolitan.
3. Mendorong pertumbuhan industri berbasis keahlian lokal melalui pemanfaatan peningkatan kualitas pendidikan dan peluang investasi di wilayah tertinggal guna menciptakan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan jaringan infrastruktur konektivitas antar daerah pinggiran untuk mengurangi ketergantungan ekonomi, mobilitas, dan layanan terhadap Kota Surabaya.
5. Mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tertinggal seperti Bangkalan melalui investasi yang merata dan pelatihan kerja berbasis sektor unggulan lokal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
6. Meningkatkan daya serap tenaga kerja terdidik dan menekan laju urbanisasi massal dengan menciptakan pusat inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah pinggiran yang berbasis potensi daerah.

Strategi pengembangan kawasan Gerbangkertosusila dipilih untuk merespons secara menyeluruh berbagai permasalahan struktural seperti ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, dominasi kota inti, serta rendahnya kontribusi wilayah pinggiran. Strategi ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas, integrasi sektor unggulan lokal dengan pengembangan SDM, serta penguatan kelembagaan lintas wilayah, sambil tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional dan potensi kawasan yang beragam, mulai dari industri, agrikultur, hingga ekonomi kreatif. Harapannya adalah terbentuknya struktur wilayah yang lebih seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar merata, ditopang oleh infrastruktur yang terintegrasi dan pengembangan potensi lokal yang saling terkoneksi secara fungsional dalam rantai nilai

regional, sehingga mengurangi tekanan urbanisasi di pusat kota. Strategi ini juga mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan berbasis keahlian, menumbuhkan industri berbasis kompetensi wilayah, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan menarik investasi inklusif ke wilayah yang sebelumnya tertinggal. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi kawasan melalui sinergi kelembagaan lintas daerah, memperkuat daya saing regional, dan membentuk ekosistem pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan Gerbangkertosusila sebagai wilayah metropolitan yang unggul, inklusif, adaptif, dan merata dalam menciptakan kesejahteraan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan keenam strategi tersebut, diperlukan pembagian prioritas berdasarkan jangka waktu implementasi yang selaras dengan kapasitas kelembagaan dan kesiapan wilayah.

Pada jangka pendek (1–3 tahun), fokus diarahkan pada strategi (1) dan (4), yakni pembangunan sistem rantai pasok regional dan jaringan infrastruktur konektivitas antar daerah pinggiran. Kedua strategi ini menjadi fondasi awal untuk membuka akses fisik dan ekonomi yang setara antarwilayah, melalui perbaikan transportasi regional, digitalisasi rantai pasok, serta sinkronisasi data spasial antar kabupaten/kota. Selanjutnya, jangka menengah (4–7 tahun) berfokus pada strategi (2), (3), dan (5), yang meliputi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan alternatif di luar Surabaya, penguatan industri berbasis keahlian lokal, serta akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Tahapan ini melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap potensi lokal.

Pada jangka panjang (8–15 tahun), strategi (6) menjadi prioritas utama, yakni peningkatan daya serap tenaga kerja terdidik dan penciptaan pusat inovasi serta ekonomi kreatif di wilayah pinggiran. Tahap ini bertujuan mewujudkan struktur ekonomi polisentris (polycentric development) yang mampu menekan ketergantungan terhadap Surabaya dan memperkuat daya saing regional secara berkelanjutan. Dengan tahapan ini, seluruh strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara bertahap dan terintegrasi, menuju sistem wilayah metropolitan yang inklusif, berdaya saing, dan seimbang dalam distribusi pertumbuhan.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan metropolitan Gerbangkertosusila memiliki peran sentral dalam sistem ekonomi Provinsi Jawa Timur, baik sebagai pusat kegiatan industri maupun sebagai simpul logistik dan jasa. Namun, dominasi Kota Surabaya dalam struktur ekonomi kawasan menyebabkan ketimpangan yang signifikan terhadap wilayah penyangga seperti Bangkalan, Lamongan, dan Kota Mojokerto. Secara empiris, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB ADHK di seluruh kabupaten/kota memang menunjukkan tren positif, tetapi belum diikuti oleh pemerataan kesejahteraan yang memadai.

Hasil perhitungan Indeks Williamson selama periode 2020–2024 memperlihatkan nilai yang konsisten tinggi, berkisar antara 0,8258 hingga 0,8631, dengan rata-rata 0,8442, yang

menandakan ketimpangan antardaerah masih kuat. Fenomena ini menggambarkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila masih berada pada fase naik dari kurva-U terbalik Williamson, di mana efek aglomerasi mendorong pertumbuhan pesat di pusat metropolitan namun belum menetes ke wilayah pinggiran. Faktor-faktor penyebab ketimpangan tersebut antara lain konsentrasi investasi di wilayah inti, ketergantungan ekonomi terhadap Surabaya, serta lemahnya diversifikasi sektor unggulan di daerah tertinggal.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik (novelty) dengan mengintegrasikan analisis pemerataan ekonomi (melalui Indeks Williamson) dan perumusan strategi pembangunan lintas wilayah (melalui SWOT) dalam satu kerangka analisis spasial yang komprehensif. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi metropolitan tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan spasial, serta menegaskan pentingnya sinergi antara teori pertumbuhan wilayah dan praktik perencanaan lintas batas administratif.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan kawasan perlu diarahkan pada langkah-langkah yang bersifat terintegrasi dan bertahap. Prioritas utama pada jangka pendek meliputi pembangunan sistem rantai pasok regional dan infrastruktur konektivitas antardaerah. Pada tahap menengah, kebijakan difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan alternatif, diversifikasi sektor berbasis potensi lokal, dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui investasi inklusif. Dalam jangka panjang, kawasan ini perlu mengembangkan pusat-pusat inovasi dan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja terdidik dan memperkuat struktur ekonomi polisentris (polycentric development).

Dari sisi kelembagaan, perlu penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota melalui forum pengelolaan metropolitan yang berorientasi pada data dan hasil analisis empiris, serta penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Implementasi kebijakan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk menggeser kawasan Gerbangkertosusila dari fase pertumbuhan terkonsentrasi menuju tahap pertumbuhan inklusif dan berkeadilan spasial di masa depan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis - Freddy Rangkuti - Google Buku.* (n.d.).

Retrieved October 31, 2025, from

<https://books.google.co.id/books?id=UHV8Z2SE57EC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Anwar, A. A., Pingkan, I., Rorong, F., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/49241>

Arsitektur, S., & Kebijakan, P. (2024). EXPLORING FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA: THE IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON THE

- ECONOMIES OF ACEH, PAPUA, AND WEST PAPUA. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 118–135. <https://doi.org/10.33701/J-3P.V9I1.4193>
- Ayu Pramitha Purwanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P., Sesuai Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, T., Riset, K., Pendidikan Tinggi, dan, Ayu Pramitha Purwanti, P., & Putu Wiwin Setyari, N. (2021). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kawasan Strategis SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 189–200. <https://doi.org/10.34001/JDEB.V18I1.2300>
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 75–86.
- Boschma, R., Coenen, L., Frenken, K., & Truffer, B. (2017). Towards a theory of regional diversification: combining insights from Evolutionary Economic Geography and Transition Studies. *Regional Studies*, 51(1), 31–45. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1258460>
- BPS Jawa Timur. (2024). *Jawa Timur Dalam Angka*.
- Chandra, A. P. (2023). PEMBANGUNAN IKN SEBAGAI MERCUSUAR STRATEGIS (KAJIAN KRITIS DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/JPG.V8I1.2898>
- Desmawan, D., Nuraisah, A., Mumtaz, A., Fadhilah, M. F., Aufa, F. S., & Malihati, L. (2024). Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman dan Industri Di Kawasan Kabupaten Bekasi. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 115–121. <https://doi.org/10.59086/jeb.v3i3.572>
- Fitriyah dan Lucky Rachmawati Fakultas Ekonomi, L., & Ketintang Surabaya, K. (2013). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3). <https://doi.org/10.26740/JUPE.V1N3.P>
- Hansen, T. (2022). The foundational economy and regional development. *Regional Studies*, 56(6), 1033–1042. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1939860>
- Hariyoko, Y. (2017). Pola Koordinasi Pembangunan Kawasan Strategis Jembatan Suramadu dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan). *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 95–106. <https://doi.org/10.30996/DIA.V15I1.1825>
- Harjanto, S. T., & Sukowiyono, G. (2017). *KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA GRESIK*.
- Iammarino, S., Rodriguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications. *Journal of Economic Geography*, 19(2), 273–298. <https://doi.org/10.1093/JEG/LBY021>
- Kamilah, A., & Yulianah, Y. (2018). LAND TENURE SYSTEM DALAM MELINDUNGI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN KEDUDUKANNYA

- DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 785. <https://doi.org/10.35194/JHMJ.V2I2.31>
- Kawet, J. A., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2019). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN TINGKAT UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MANADO. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(10). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.23446.19.10.2019>
- Mahardika, R. (2019). *ANALISIS SPASIAL PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN METROPOLITAN GERBANGKERTOSUSILA*.
- Maria, W. N., Ulpa, A., Kirana, N. N., Ulpa, A., & Handayani, D. N. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 210–224. <https://doi.org/10.33701/J-3P.V8I2.3805>
- Martin, R. (2015). Rebalancing the spatial economy: The challenge for regional theory. *Territ. Politic. Gov.*, 3(3), 235–272.
- Niessen, L. W., Mohan, D., Akuoku, J. K., Mirelman, A. J., Ahmed, S., Koehlmoos, T. P., Trujillo, A., Khan, J., & Peters, D. H. (2018). Tackling socioeconomic inequalities and non-communicable diseases in low-income and middle-income countries under the Sustainable Development agenda. *Lancet*, 391(10134), 2036–2046.
- Studi, P., Pembangunan, E., Bisnis, I., & Bekasi, M. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN DI KOTA BERBATASAN DENGAN KAWASAN METROPOLITAN. *DEVELOP : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.53990/DEVELOP.V3I2.109>
- PERPRES No. 66 Tahun 2022. (n.d.). Retrieved October 31, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210110/perpres-no-66-tahun-2022?>
- PERPRES No. 80 Tahun 2019. (n.d.). Retrieved October 31, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126140/perpres-no-80-tahun-2019>
- Putri, D. A. K., Khalfani, M. R., Radinka, M. R., & Nirwana, N. S. (2025). Transformasi infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas Dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Di Jakarta. *IPSSJ*, 2(03 Juli), 4788–4799.
- Rahmat, B. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 100.
- Rizzo, M. T., & Killen, M. (2016). Children's understanding of equity in the context of inequality. *The British Journal of Developmental Psychology*, 34(4), 569–581. <https://doi.org/10.1111/BJDP.12150;CTYPE:STRING:JOURNAL>
- Roselin, R., & Nainggolan, E. (2024). AGLOMERASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH:: STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 230–251. <https://doi.org/10.33701/J-3P.V9I2.4210>

Santosa, T., & Kholid, A. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN DI KOTA BERBATASAN DENGAN KAWASAN METROPOLITAN. *DEVELOP : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.53990/DEVELOP.V3I2.109>

Spasial, A., Kawasan, K., Ekonomi, S., Barat-Timur, K., Wilayah, P., Sumatera Barat, P., Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B. (2022). Analisis Spasial Karakteristik Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Barat-Timur dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat. *TATALOKA*, 24(2), 141–155. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.24.2.141-155>

sulmiah, S., Sakawati, H., Widyawati, W., & Rukmana, N. S. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN METROPOLITAN DI INDONESIA TIMUR: DAMPAK TERHADAP TATA KELOLA PERKOTAAN. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 258–272. <https://doi.org/10.31113/JIA.V16I2.519>

Trump, K. S. (2020). When and why is economic inequality seen as fair. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 34, 46–51. <https://doi.org/10.1016/J.COBEHA.2019.12.001>

Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 1–84. <http://www.jstor.org/stable/1152097>

Xiao, Y., Wang, Z., Li, Z., & Tang, Z. (2017). An assessment of urban park access in Shanghai – Implications for the social equity in urban China. *Landscape and Urban Planning*, 157, 383–393. <https://doi.org/10.1016/J.LANDURBPLAN.2016.08.007>

Zabala, A. (2019). Measuring inequality. *Nature Sustainability*, 2(8), 656. <https://doi.org/10.1038/S41893-019-0368-1;SUBJMETA>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).